



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TA. 2024

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. S. Parman No.62 Telp/Fax.0631-21244 Kode Pos 22523
SIBOLGA

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja serta wujud transparansi dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelola keuangan daerah.

LKIP ini disusun dengan menyampaikan sasaran strategis serta indikator kinerja utama yang diukur melalui pengukuran kinerja dan analisis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 selain sebagai media pertanggungjawaban menginformasikan kondisi kerja melalui pencapaian sasaran Tahun 2024 serta target pencapaian sasaran periode Renstra Tahun 2021-2026.

Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga Tahun 2024.

Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Sibolga, Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA SIBOLGA



AMARJILAH GULTOM, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19670312 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Penjelasan Umum Organisasi	1
2.1. Aspek Strategis Orgnisasi	2
2.1.1. Isu Strategis	2
2.1.2. Permasalahan	4
2.1.3. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Organisasi	4
2.2. Struktur Organisasi	6
2.3. Anggaran Tahun 2024	8
3. Dasar Hukum	9
4. Sistematika Penyusunan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Kinerja	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja	16
2.5 Perencanaan Anggaran	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi	26
3.1.2. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	28
3.1.3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	28
3.1.4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	29
3.1.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan	

Anggaran Tujuan dan Sasaran	30
3.1.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	31
3.1.7. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	35
3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja	8
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Indikator, dan Target Kinerja Badan pengelola keuangan pendapatan dan Aset Daerah kota Sibolga Tahun 2021-2026.....	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kota Sibolga Tahun 2024	14
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.....	15
Tabel 2.4	Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja	17
Tabel 2.5	Perencanaan Kinerja	19
Tabel 3.1.	Sasaran, Indikator Kinerja Dan Program Tahun 2024	24
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	25
Tabel 3.3.	Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1	26
Tabel 3.4.	Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2	27
Tabel 3.5.	Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3	27
Tabel 3.6.	Kemajuan Capain Sasaran Strategis	28
Tabel 3.7.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	29
Tabel 3.8.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	30
Tabel 3.9.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan	32
Tabel 3.10.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	35
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga	7
----------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP juga dapat dijadikan bahan bagi Walikota untuk melihat sejauh mana organisasi perangkat daerah tersebut telah mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKIP ini bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh organisasi. Renstra dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam perencanaan yang sistematis untuk mencapai tata kelola pemerintahan

yang baik dan juga sebagai media dalam pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan transparan.

2.1. Aspek Strategis Organisasi

Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian RPJMD Kota Sibolga menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan OPD Kota Sibolga.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Sibolga. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Walikota yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden.

Dengan demikian, maka sesuai arah pembangunan RPJMD tahap ketiga maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berupaya menyusun arah kebijakan dan program/ kegiatan agar menjadi sinkron dengan arah pembangunan Kota Sibolga sesuai misi yaitu **Misi Pertama :Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dengan transparan dan akuntabel.** Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melalui program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat

mendukung pembangunan Sibolga untuk mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel yang merupakan sebuah langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan Transparan dan Akuntabel.

2.1.1. Isu Strategis

Adapun isu –isu strategis yang menjadi fokus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yaitu:

1. Belum dimanfaatkannya teknologi informasi secara optimal dalam menunjang sistem informasi keuangan yang transparan, efisien, efektif, akuntabel dan auditabel;
2. Pengelolaan aset dan barang milik daerah yang kurang optimal;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif;
4. Sumber daya aparatur yang masih minim.

2.1.2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pemamfaatan teknologi informasi secara optimal sehingga tercipta sistem informasi keuangan yang transparan, efisien, efektif, akuntabel dan auditabel;
2. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) bagi semua bidang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sehingga tidak ada standart yang digunakan untuk mengukur pekerjaan;

3. Kebutuhan akan sarana prasarana kantor dalam mendukung operasional kantor dan pelayanan terus meningkat.
4. Pengelolaan asset belum optimal terkait penguasaaan atau pemanfaatan asset oleh pihak lain.

2.1.3. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 tahun 2017. Adapun susunan (struktur organisasi berdasarkan jenjang jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, adalah terdiri dari : 1 (Satu) orang eselon III, 4 (Empa) orang eselon III, dan 14 (Empat belas) orang eselon IV.

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, diatur berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sibolga Nomor 22 Tahun 2017 yaitu untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, struktur organisasi dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi

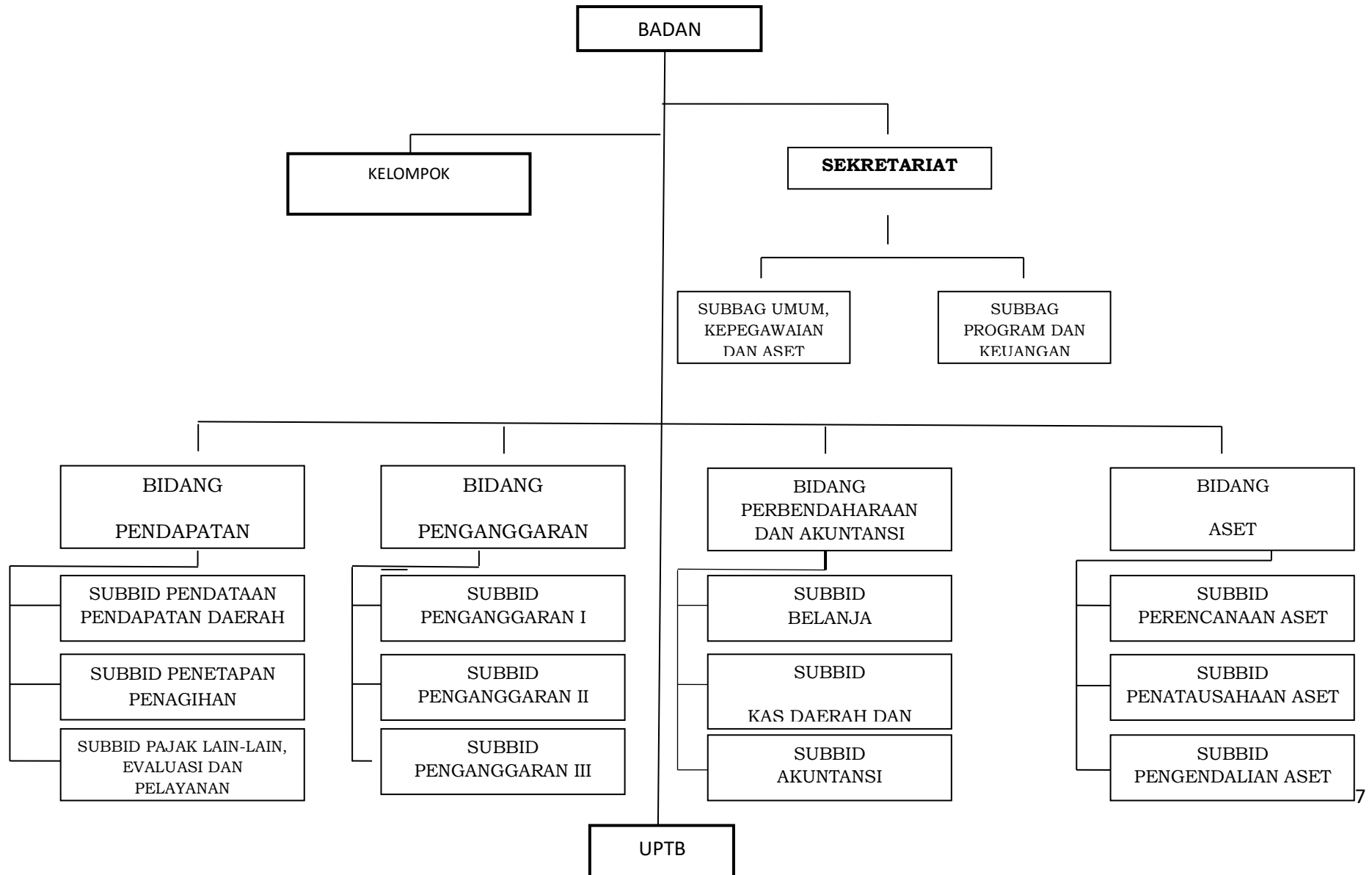
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga menetapkan fungsi:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada OPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
2. Dana Perimbangan :
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
3. Arah Pengelolaan Belanja Daerah :
 - a. Meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepadamasyarakat;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

- 2.2.** Guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan dan focussed group discussion untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan **Struktur Organisasi**

Gambar. 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA**



2.3. Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 30/12/2023 dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 63 Tahun 2023 tanggal 20/11/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sibolga Tahun 2024, **anggaran Pendapatan Tahun 2024, RP 715,578,640,348.00** mengalami perubahan menjadi Rp. 705.611.980.162,00 dan **Belanja Daerah Tahun 2024** semula berjumlah **Rp. 67,615,981,635.00** mengalami perubahan menjadi **Rp. 67,458,805,175.00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Rek			URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			Pendapatan	715.578.640.348,00	705.611.980.162,00	(9.966.660.186,00)
4	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164.397.325.884,00	154.430.665.758,00	(9.966.660.126,00)
4	2		Pendapatan Transfer	543.024.939.164,00	543.024.939.104,00	(60,00)
4	3		Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	8.156.375.300,00	8.156.375.300,00	-
Jumlah Pendapatan				715.578.640.348,00	705.611.980.162,00	(9.966.660.186,00)
5			Belanja daerah	67.615.981.635,00	67.458.805.175,00	(157.176.460,00)
5	1		Belanja Operasi	65.710.579.835,00	63.184.917.072,00	(2.525.662.763,00)
5	2		Belanja Modal	405.401.800,00	386.576.800,00	(18.825.000,00)
5	3		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	3.887.311.303,00	2.387.311.303,00
Jumlah Belanja				67.615.981.635,00	67.458.805.175,00	(157.176.460,00)

3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
- 12 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga;
- 13 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2023-2026;
- 14 Peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematiika Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dapat diilustrasikan sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 yang dalam hal ini disebut sebagai perjanjian kinerja digunakan untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024 yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023/2024 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimuat dalam RENSTRA SKPD 2021-2026. Setelah Perubahan dan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun. Target IKU ini kemudian dijabarkan kedalam perjanjian kinerja tahunan seluruh SKPD dengan Kepala Daerah. Adapun IKU Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Kota Sibolga mengandung indikator yaitu Pada Tabel Berikut:

BAB II-Perencanaan Kinerja

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran Indikator, dan Taarget Kinera Badan Pengelolaan keuangan pendapatan dan Aset Daerah
Kota Sibolga Tahun 2021-2016

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
			2. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
			3. Persentase SILPA terhadap APBD	10%	8%	7%	5%	3%	0%		
			4. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0%		
			5. Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
			6. Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
			7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	75% / 25%	75% / 25%	75% / 25%	75% / 25%	75% / 25%	75% / 25%		
			8. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0	0	0	0	0	0		
			9. Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
			10. Persentase luas lahan bersertifikat	10%	10%	10%	10%	10%	10%		

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Dalam Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga disusun berdasarkan indikator Kinerja utama yang merupakan acuan target dalam penyelesaian masalah-masalah pada rencana strategis. Adapun indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS . INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional				
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	on process		
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	23%		13%
Persentase OPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	100%	100%	100%	
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat				
Persentase realisasi pajak daerah	95%	105%	111%	
Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel				
Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	100%	100%	100 %	
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	95%	94%	94%	

Dari tabel diatas Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi rujukan dalam penyusunan LKIP ini adalah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Rencana kinerja adalah acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024:

Tabel 2.3

**Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan bersih	1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
			2. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%
			3. Persentase OPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	100%
		2. Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang semakin meningkat	1. Persentase realisasi pajak daerah	95%
		3. Terciptanya Pengelolaan Aset yang Transparan dan Akuntabel	1. Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	100%
			2. Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	95%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP).

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu

kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran I dan II LKIP ini**.

2.4. Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja

Adapun Metode pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yaitu pada tabel berikut:

BAB II-Perencanaan Kinerja

Tabel 2.4

Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Defenisi Operasional	Formulasi Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemerintahan	1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini WTP	BPKPAD
			2. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Persen	Mengukur Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	$\text{Toleransi deviasi penyerapan keuangan} = 100\% - \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$	BPKPAD
			3. Persentase OPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Persen	Mengukur Persentase OPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{OPD yang menerapkan LK berbasis akrual}}{\text{Jumlah OPD di Pemko Sibolga}} \times 100\%$	BPKPAD
		2. Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang semakin meningkat	1. Persentase realisasi pajak daerah	Persen	Mengukur Persentase realisasi pajak daerah	$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$	BPKPAD
		3. Terciptanya Pengelolaan Aset yang Transparan dan Akuntabel	1. Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	Persen	Mengukur persentase tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{OPD yang mempunyai KIB}}{\text{Jumlah OPD di Pemko Sibolga}} \times 100\%$	BPKPAD
			2. Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	Persen	Mengukur persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{Luas bidang tanah yang berhasil disertifikatkan}}{\text{Target luas bidang tanah yang disertifikatkan}} \times 100\%$	BPKPAD

2.5 PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja diatas diperlukan sumberdaya yang salah satunya adalah sumber daya anggaran dengan perencanaan yang dimulai dari rancangan awal, akhir dan perubahan. Adapun rencana anggaran yang disampaikan dalam LKIP ini dalah Seperti Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Sibolga

Paik	Uraian	Pagu		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA	116.584.401.090,00	67.615.981.635,00	75.606.336.559,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	116.584.401.090,00	67.615.981.635,00	75.606.336.559,00
5 02	KEUANGAN	116.584.401.090,00	67.615.981.635,00	75.606.336.559,00
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.387.752.200,00	47.197.242.190,00	45.473.802.032,00
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	-	-
5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.105.000.000,00	33.951.794.104,00	33.767.555.239,00
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.000.000.000,00	33.951.794.104,00	33.767.555.239,00
5 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000,00	-	-
5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000,00	-	-
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000,00	-	-
5 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	-	-
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	427.752.200,00	262.595.511,00	166.179.100,00
5 02 01 2.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	126.780.400,00	96.190.411,00	-
5 02 01 2.04 0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	102.568.600,00	92.559.500,00	-
5 02 01 2.04 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	92.496.400,00	59.174.500,00	-
5 02 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	105.906.800,00	14.671.100,00	166.179.100,00
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510.000.000,00	404.004.000,00	571.530.000,00

LKIP BPKPAD KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

BAB II-Perencanaan Kinerja

5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	146.400.000,00	146.400.000,00
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	-	-
5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00	-	-
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	-	-
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	270.000.000,00	257.604.000,00	425.130.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.380.000.000,00	1.069.707.688,00	1.496.601.288,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	30.535.600,00	30.535.600,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	197.208.800,00	197.208.800,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	270.731.488,00	299.666.288,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	41.377.600,00	44.669.400,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	29.998.200,00	29.998.200,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,00	499.856.000,00	894.523.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.000.000,00	405.401.800,00	386.576.800,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	70.000.000,00	60.691.800,00	41.866.800,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000,00	344.710.000,00	344.710.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.215.000.000,00	10.208.840.500,00	7.861.061.018,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000.000,00	9.150.255.500,00	6.831.276.018,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000.000,00	1.043.600.000,00	1.014.800.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.000.000,00	894.898.587,00	1.224.298.587,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000,00	262.339.600,00	262.339.600,00
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	40.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	149.677.600,00	479.077.600,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	387.036.387,00	182.824.746,00
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00	69.845.000,00	274.056.641,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	38.050.000.000,00	14.480.067.286,00	19.810.959.657,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.750.000.000,00	3.682.813.515,00	7.654.357.915,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.000.000,00	127.610.675,00	692.176.675,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	300.000.000,00	127.735.675,00	326.801.675,00

LKIP BPKPAD KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

BAB II-Perencanaan Kinerja

5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	300.000.000,00	94.034.300,00	94.034.300,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	300.000.000,00	93.784.300,00	93.784.300,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	300.000.000,00	93.909.300,00	293.975.300,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	750.000.000,00	281.727.900,00	439.851.900,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.000.000.000,00	556.053.025,00	1.111.442.000,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.500.000.000,00	749.537.575,00	799.460.475,00
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.500.000.000,00	887.376.965,00	2.958.616.104,00
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	500.000.000,00	-	-
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.000.000.000,00	671.043.800,00	844.215.186,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.300.000.000,00	1.298.345.370,00	2.507.802.670,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.500.000.000,00	698.049.600,00	1.501.893.700,00
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000,00	-	-
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300.000.000,00	69.257.400,00	69.257.400,00
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	200.000.000,00	34.131.600,00	34.131.600,00
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	300.000.000,00	112.165.700,00	112.165.700,00
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.000.000,00	-	-
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	200.000.000,00	53.071.000,00	53.071.000,00
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	200.000.000,00	37.159.740,00	37.159.740,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	150.000.000,00	-	-
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	250.000.000,00	53.716.280,00	323.398.280,00

LKIP BPKPAD KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

BAB II-Perencanaan Kinerja

5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	240.794.050,00	376.725.250,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	503.527.800,00	1.336.638.700,00
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	200.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	200.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	400.000.000,00	55.702.800,00	209.873.700,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	300.000.000,00	249.719.700,00	241.651.700,00
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	150.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200.000.000,00	79.247.600,00	416.243.600,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	118.857.700,00	468.869.700,00
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	150.000.000,00	-	-
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	-	-
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	23.000.000.000,00	8.995.380.601,00	8.312.160.372,00
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	4.793.940.601,00	4.810.720.372,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	4.201.440.000,00	3.501.440.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.730.000.000,00	1.800.000.000,00	3.849.515.500,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.730.000.000,00	1.800.000.000,00	3.849.515.500,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	260.000.000,00	172.832.800,00	331.423.850,00

LKIP BPKPAD KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

BAB II-Perencanaan Kinerja

5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	220.265.850,00	117.439.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	68.242.700,00	469.752.700,00
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	280.000.000,00	-	-
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	280.000.000,00	152.217.300,00	245.239.800,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	250.000.000,00	222.801.050,00	297.742.350,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	199.986.650,00	414.072.050,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	50.000.000,00	48.909.700,00	73.275.500,00
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	249.982.250,00	361.521.100,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	380.000.000,00	159.856.400,00	513.063.000,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	50.016.900,00	318.831.500,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.000.000,00	154.929.100,00	330.369.100,00
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.959.300,00	376.785.550,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.416.648.890,00	4.138.672.159,00	6.472.059.370,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.416.648.890,00	4.138.672.159,00	6.472.059.370,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	165.000.000,00	164.996.200,00	332.753.200,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	172.500.000,00	172.499.900,00	710.500.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	176.419.980,00	176.419.770,00	363.594.770,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	320.000.000,00	-	-
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	330.000.000,00	329.000.700,00	743.610.300,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	270.000.000,00	269.999.600,00	575.515.000,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	472.868.800,00	625.618.200,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	745.000.000,00	726.094.211,00	-
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	137.000.000,00	64.376.957,00	312.492.900,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	957.728.910,00	940.569.900,00	342.819.900,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	221.500.000,00	166.937.800,00	331.075.300,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	260.000.000,00	226.361.021,00	-
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	183.000.000,00	182.999.900,00	567.532.900,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	198.500.000,00	163.499.000,00	1.285.861.800,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	430.000.000,00	82.048.400,00	280.685.100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (sebelum perubahan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024. Adapun pencapaian Kinerja tahun 2024 diperoleh dari pelaksanaan 1 (Satu) sasaran dan 3 (Tiga) IKU dan 4 (Empat) program dijabarkan kedalam tabel-tabel berikut:

Tabel.3.1
SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	
		Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	
		Persentase Belanja Pendidikan	

		Persentase belanja kesehatan	
		Penetapan APBD	
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat	Persentase PAD terhadap Pendapatan	2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel	Persentase luas lahan bersertifikat	3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Uraian terhadap pencapaian indikator kinerja program tersebut dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kegiatan seperti tertera dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WDP	50%	Sedang	BPKPAD
		Persentase SILPA terhadap APBD	5%	0,63%	187%	Sangat tinggi	BPKPAD
		Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	0,2%	1,71%	855%	Sangat tinggi	BPKPAD
		Persentase Belanja Pendidikan	20%	16,13%	81%		BPKPAD
		Persentase belanja kesehatan	10%	34,27%	343%	Sangat tinggi	BPKPAD
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu		BPKPAD
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat	Persentase PAD terhadap Pendapatan	95	76,68	80,72 %	Sangat tinggi	BPKPAD

3	Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel	Persentase luas lahan bersertifikat	10%	68,31%	683 %	Sangat tinggi	BPKPAD
---	--	-------------------------------------	-----	--------	-------	---------------	--------

Sumber: BPKPAD

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi

Dari tabel 3.2, di atas tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berada pada skala nilai Baik dengan rata-rata capaian kinerja 99,75%. Namun ada beberapa indikator yang rendah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Strategis 1 :

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
			2022	2023			
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	50%
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8.96	0.008	5	0,63	187%
3	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	8.9	0.2	1,71	855%
4	Persentase Belanja Pendidikan	%	20.05	20	20	16,13	81%
5	Persentase belanja kesehatan	%	10	77	10	34,27%	343%
6	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak ada kenaikan dan penurunan realisasi.

Pencapaian Sasaran Strategis 2 :

Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024(%)
			2022	2023			
1	Persentase Capaian pengelolaan pendapatan daerah	%	13.26	92	95	80,72	84,96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan sebesar 11,27 %.

Pencapaian Sasaran Strategis 3 :

Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel

Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 serta dikaitkan dengan target Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
			2022	2023			
1	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	%	65.38	23,33	10	68,31	683,1

Dari tabel diatas Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan realisasi sebesar 44,98

3.1.2.KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Adapun Kemajuan Capain Sasran Strategis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang mana Tahun 2024 adalah tahun ke- 4 Renstra 2021-2026 adalah pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Kemajuan Capain Sasran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Taget Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5/100
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WDP	WTP	50%
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,63%	5%	187%
		Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	1,71%	0,2%	855%
		Persentase Belanja Pendidikan	16,13%	20%	81%
		Persentase belanja kesehatan	34,27%	10%	343%
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat	Persentase Capaian pengelolaan pendapatan daerah	80,72	95	84,96%
3	Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	68,31	10	683%

Sumber: BPKPAD

3.1.3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melalui program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendukung pembangunan Sibolga untuk mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel yang merupakan sebuah langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan Transparan dan Akuntabel”. Hubungan yang sinergis antara sasaran Kementerian Keuangan dengan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berupa:

- Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional;
- Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat;
- Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel;

3.1.4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Adapun Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Kinerja tahunan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisis Keberhasilan, Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WDP	50%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase SILPA terhadap APBD	5%	0,63%	187%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	

	Transparan dan Akuntabel	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	0,2%	1,71%	855%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase Belanja Pendidikan	20%	16,13%	81%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase belanja kesehatan	10%	34,27%	343%	Dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan	
		Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat	Persentase Capaian pengelolaan pendapatan daerah	95	80,72	84,96%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	
3	Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	10	68,31	683%	Dilakukan sesuai dengan perencanaan	

3.1.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	WTP	WDP	50%	16,850,063,015.00	6,130,523,974.00	36.38%	65,25 %

	Daerah yang Transparan dan Akuntabel	5%	0,63%	187%				
		0,2%	1,71%	855%				
		20%	16,13%	81%				
		10%	34,27%	343%				
		Tepat waktu	Tepat Waktu	100%				
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat	95	80,72	84,96%	4,192,786,570.00	2,993,404,593.00	71.39%	28,61%
3	Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel	10	68,31	683%	1,797,492,500.00	1,347,598,622.00	74.97%	25,03

3.1.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.

Dari tabel di atas realisasi pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan

NO	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1	Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Persentase OPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan Daerah	100%	100%	100%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Persentase capaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase capaian Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan

				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	100%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	1	100%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian pengelolaan pendapatan daerah	95%	92%	97%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Pengelolaan pendapatan Daerah	95%	92%	97%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan

				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah	95%	99%	104%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah	95%	99%	104%	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan

3.1.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 4 Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 67.458.805.175,00, dan Realisasi Sebesar 37.393.672.389,00, (55,43%) dengan Tabel Sebagai berikut

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)
5	BELANJA DAERAH	67.458.805.175,00	37.393.672.389,00	55,43%
5,02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA	67.458.805.175,00	37.393.672.389,00	55,43%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.618.463.090,00	26.922.145.200,00	60,34%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.977.685.846,00	16.478.293.124,00	49,97%
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23.421.100,00	22.691.900,00	96,89%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.110.000,00	287.820.100,00	82,68%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.017.688,00	1.006.035.925,00	97,77%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386.576.800,00	362.650.000,00	93,81%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.958.790.710,00	8.032.200.951,00	89,66%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.860.946,00	732.453.200,00	81,85%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.850.063.015,00	6.130.523.974,00	36,38%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.668.947.015,00	2.784.436.532,00	75,89%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.286.184.525,00	1.201.041.155,00	93,38%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	495.459.800,00	462.898.402,00	93,43%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.399.471.675,00	1.682.147.885,00	14,76%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.797.492.500,00	1.347.598.622,00	74,97%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.797.492.500,00	1.347.598.622,00	74,97%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.192.786.570,00	2.993.404.593,00	71,39%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.192.786.570,00	2.993.404.593,00	71,39%

Dari tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 terealisasi dengan baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)
5	BELANJA DAERAH	67.458.805.175	37.393.672.389	55,43%
5,02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA	67.458.805.175	37.393.672.389	55,43%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.618.463.090	26.922.145.200	60,34%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.977.685.846	16.478.293.124	49,97%
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.977.685.846	16.478.293.124	49,97%
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23.421.100	22.691.900	96,89%
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	23.421.100	22.691.900	96,89%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.110.000	287.820.100	82,68%
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	146.400.000	129.652.000	88,56%
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	201.710.000	158.168.100	78,41%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.017.688	1.006.035.925	97,77%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.535.600	29.869.000	97,82%
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.208.800	187.076.100	94,86%
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.731.488	263.938.600	97,49%
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.377.600,00	40.627.500,00	98,19%
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	29.998.200	27.014.000	90,05%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.166.000	457.510.725	99,64%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386.576.800	362.650.000	93,81%
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	41.866.800	40.000.000	95,54%
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.710.000	322.650.000	93,60%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.958.790.710	8.032.200.951	89,66%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.985.000	11.988.000	80,00%
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.929.005.710	7.019.612.951	88,53%

5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.014.800.000	1.000.600.000	98,60%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.860.946	732.453.200	81,85%
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.339.600	179.250.700	68,33%
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	26.000.000	25.339.500	97,46%
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.677.600	136.010.000	90,87%
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.824.746	175.000.000	95,72%
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	274.019.000	216.853.000	79,14%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.850.063.015	6.130.523.974	36,38%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.668.947.015	2.784.436.532	75,89%
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	147.581.675	122.150.300	82,77%
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	147.706.600	-	0,00%
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	94.034.300	92.779.500	98,67%
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	39.918.150	35.828.000	89,75%
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	93.909.300	92.371.000	98,36%
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	281.727.900	277.961.000	98,66%
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	527.030.900	388.376.989	73,69%
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	799.460.400	619.479.400	77,49%
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.041.362.604	769.463.400	73,89%
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	496.215.186	386.026.943	77,79%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.286.184.525	1.201.041.155	93,38%
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	691.449.600	684.721.033	99,03%
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	69.257.400	66.296.700	95,73%
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	34.131.600	33.467.719	98,05%
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.165.700	111.151.403	99,10%
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.071.000	46.275.400	87,20%

5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	37.159.700	36.149.000	97,28%
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43.804.275	34.251.600	78,19%
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	245.145.250	188.728.300	76,99%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	495.459.800	462.898.402	93,43%
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	55.702.800	39.951.000	71,72%
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	241.651.700	238.633.602	98,75%
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	79.247.600	78.343.600	98,86%
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118.857.700	105.970.200	89,16%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.399.471.675	1.682.147.885	14,76%
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.810.720.372	146.001.659	3,03%
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.588.751.303	1.536.146.226	23,31%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.797.492.500	1.347.598.622	74,97%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.797.492.500	1.347.598.622	74,97%
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	192.533.850	134.230.100	69,72%
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.789.000	7.268.000	93,31%
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	111.562.700	76.652.200	68,71%
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.069.800	186.316.900	96,01%
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	297.742.350	249.057.800	83,65%
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	176.497.050	130.725.100	74,07%
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	73.275.500,00	36.616.700,00	49,97%
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	169.065.100	128.792.522	76,18%
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	157.284.000	89.262.500	56,75%
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81.645.500	47.440.200	58,11%
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	154.929.100	136.573.600	88,15%
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	181.098.550	124.663.000	68,84%

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.192.786.570	2.993.404.593	71,39%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.192.786.570	2.993.404.593	71,39%
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	332.753.200	269.931.694	81,12%
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	322.830.700	132.811.462	41,14%
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	160.734.770	136.845.000	85,14%
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	302.922.800	281.041.500	92,78%
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	318.700.000	290.547.700	91,17%
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	513.613.700	339.003.200	66,00%
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	217.462.900	163.655.634	75,26%
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	201.931.900	196.493.750	97,31%
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	179.539.800	164.178.600	91,44%
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	185.399.900	164.093.500	88,51%
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.285.861.800	687.005.553	53,43%
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	171.035.100,00	167.797.000,00	98,11%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2024. Dalam LKIP ini telah disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan serta evaluasi dan analisis capaian yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga pada tahun 2024 dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai predikat “sangat tinggi” dengan rata-rata 100,28%.

Keberhasilan ini adalah berkat dukungan, keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang telah berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain yang mendukung sehingga masih terdapat kendala yang memerlukan perhatian dan pembenahan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya dengan disusunnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat dijadikan umpan balik guna peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. LKIP juga dapat dijadikan sebagai motivator untuk lebih meningkatkan kinerja dinas terhadap tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dalam pembangunan lebih dapat dirasakan. Oleh karena itu juga dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kedepannya ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Selama tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan;
2. Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama tersebut, secara umum berhasil dicapai 4 (empat) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, 1 (satu) indikator sedikit dibawah target dan 1 (satu) indikator masih dalam proses penyelesaian;
3. Sasaran pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tahun 2024 memiliki nilai rata-rata **96,3%** dengan kategori **MEMUASKAN**;
4. Perlunya peningkatan pelatihan Pendidikan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan sumber daya aparatur;
5. Perlunya upaya yang terus menerus untuk mengkaji dan mengembangkan sumber - sumber Penerimaan PAD sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata.
6. Perlunya peningkatan manajemen aset agar penatausahaan aset semakin baik dan akurat.

Sibolga, Februari 2025

Plt.KEPALA BADAN PENGELOLAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA
SIBOLGA



AMARULLAH GULTOM, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199103 1 007